



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 312 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KECAMATAN
JARO KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengajuan pengunduran diri Sdr. Wahyuli sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Lano Kecamatan Jaro Periode 2020 sampai dengan 2026 pada tanggal 2 Mei 2023, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lano Kecamatan Jaro, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Lano pada tanggal 16 Mei 2023 telah sepakat mengusulkan Sdr. Rahmad sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu, perlu diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Lano Kecamatan Jaro sebagaimana disampaikan dengan Surat Camat Jaro Nomor B-118/CJ/Pem/100/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penyampaian Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Lano Kecamatan Jaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:
 Nama : Wahyuli
 Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 Pendidikan : SLTP
 Umur : 43 Tahun
 Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

- KEDUA : Mengangkat:
Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah
Penetapan Anggota BPD tingkat Desa di Wilayah Kecamatan Jaro
Kabupaten Tabalong:
Nama : Rahmad
Pendidikan : SLTA
Umur : 36 Tahun
Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar
Waktu Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan
berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI TABALONG, 





ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Jaro di Jaro
2. Kepala Desa Lano di Desa Lano.
3. Ketua BPD Desa Lano di Desa Lano
4. Yang bersangkutan.